

LAPORAN PENELITIAN

PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (SUATU STUDI DI SMA KOTA PADANG)



Peneliti

Drs. Helmi Hasan, M.Pd

MILIK PERPUSTAKAAN UNIV. NEGERI PADANG	
DITERIMA TGL :	02-9-2013
SUMBER/HARGA :	Hd
KOLEKSI :	K1
NO. INVENTARIS :	130/Hd/2013.P-1 (1)
KLASIFIKASI :	

Dibiayai oleh

DIPA Universitas Negeri Padang Tahun 2010
Nomor:0126/023-4.2/III/2009 tanggal 31 Desember 2009

PRODI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU – ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010

MILIK PERPUSTAKAAN
UNIV. NEGERI PADANG

ABSTRAK

Warga Negara yang baik, cerdas, bertanggung jawab, demokratis sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 masih jauh dari harapan yang ditandai oleh berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti anarkis, unjuk rasa dengan kekerasan, tidak peduli kepada orang lain, dsb. Pembentukan warga negara yang baik tersebut merupakan tugas pokok Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Keberhasilan guru PKn dalam melaksanakan pembelajaran ditentukan oleh banyak faktor diantaranya yang sangat menentukan adalah materi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru. Bertolak dari hal demikian masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran materi pembelajaran dan cara guru mengembangkan atau mengkonstruksi materi pembelajaran yang akan digunakannya dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Kota Padang.? Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih jelas cara guru mengembangkan materi dan gambaran materi pembelajaran PKn di SMA Kota Padang.

Metode penelitian yang digunakan pada dasarnya kualitatif dengan sedikit menggunakan prinsip-prinsip kuantitatif. Informan penelitian adalah guru-guru PKn, Pengawas sekolah, dan Kepala sekolah. Data dikumpulkan melalui wawancara, angket, studi dokumentasi, serta diolah secara kualitatif.

Berdasarkan metode diatas di temukan bahwa guru telah melakukan pengembangan materi pembelajaran menurut langkah-langkah tertentu yang jelas namun masih belum menganalisis SK dan KD secara lebih baik. Guru mengembangkan KD kedalam bentuk indikator dan tujuan dengan mempedomani buku-buku PKn yang ada. Gambaran materi pembelajaran yang dikembangkan pada umumnya sudah sesuai dengan SK dan KD yang ada dalam kurikulum yang meletakkan prinsip demokrasi sebagai titik sentral. Dari 6 semester di SMA hanya satu semester yang tidak memuat prinsip demokrasi. Suatu hal yang perlu disempurnakan dalam mengembangkan materi adalah perlunya keterpaduan prinsip-prinsip demokrasi itu dalam kegiatan pembelajaran.

1. Judul Penelitian : PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (Suatu Studi di SMA
Kota Padang)

2. Ketua Peneliti:

a. Nama : Drs. Helmi Hasan, M.Pd.
b. Jenis kelamin : Laki-laki
c. NIP / Golongan : 194906141975031002/ IV.b
d. Jab. Fungsional : Lektor Kepala
e. Jabatan Struktural : -.-
f. Bidang Ilmu : Ilmu Politik
g. Alamat : Jln. Prof. Dr Hamka-Air Tawar
h. Telpon/Faks/E-mail : 0751-445187
i. Alamat rumah : Wisma Indah III Blok Y.No.2 Tabing Padang
Telp/E.-mail : 08126700546/ helmi.hasan.unp@yahoo.com

3. Anggota Peneliti

1. Drs. Syafnil Effendi, SH
2. Drs. Yasril Yunus, M.Si.

4. Mata Kuliah yang Diampu

a. Mata Kuliah I : Ilmu Politik
b. Mata Kuliah II : Strategi Pembelajaran PKn.

Mengetahui :
Ketua Jurusan ISP FIS UNP

Drs. Yasril Yunus M.Si
NIP.195310171982111002

Padang, November 2010
Peneliti,

Drs. Helmi Hasan, M.Pd.
NIP: 194906141975031002



DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan.....	i
Daftar Isi	ii
Kata Pengantar.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Masalah dan Fokus Penelitian.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Pendidikan Kewarganegaraan dan Tujuannya.....	6
B. Materi Pendidikan Kewarganegaraan.....	7
C. Kerangka Konseptual.....	8
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	15
B. Lokasi dan Setting Penelitian....	15
C. Informasi Penelitian.....	16
D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	16
E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	17
F. Teknik Analisa Data.....	18
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum SMA Kota Padang.....	20
B. Mata Pembelajaran dan Guru PKn di Kota Padan.....	21
C. Materi Pembelajaran PKn.....	24
D. Pembahasan.....	33
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	39
B. Saran.....	40
DAFTAR RUJUKAN.....	41

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era reformasi sebagaimana dikatakan Sapriya dan Udin S. Winataputra (2006: 1.1) pada hakekatnya proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah kepada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Usaha ini merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi sebagaimana dikatakan Zamroni (1998: 5) ”guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berfikir kritis dan bertindak demokratis”.

Selanjutnya dikatakan fungsi pokok PKn adalah mengembangkan kecerdasan warga negara (*civil intellegence*), membina tanggung jawab warga negara (*civil responsibility*), dan mendorong partisipasi warga negara) *civil participation*) (Sapriya dan Udin S. Winataputra, 2006: 1.1) Sejak adanya mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (1957) atau pun Pendidikan Moral Pancasila di SLTP dan SLTA (1975) serta Pendidikan Pancasila di perguruan tinggi (1975) materi tentang demokrasi yang pada hakekatnya menanamkan nilai-nilai demokrasi agar bersikap dan bertingkah laku demokratis selalu ditemukan. Hal itu dikuatkan melalui kurikulum yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional dan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah termasuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya pembentukan sikap dan prilaku demokrasi bukanlah gagasan baru dalam kehidupan berbangsa di Indonesia, karena nilai-nilai demokrasi sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu kala dan selalu

dibudayakan. Dalam Masyarakat Minangkabau misalnya ditemukan ungkapan “ *bulek aia dek pambuluah, bulek kato dek mufakaek. Basilang kayu dalam tungku disinan api mangko iduik*” artinya kesepakatan terjadi karena adanya musyawarah, dan dalam musyawarah itu perbedaan pendapat merupakan motivasi dalam menemukan kebenaran yang diyakini bersama sebagai hasil mufakat. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari suku-suku bangsa yang memiliki adat dan budaya yang berbeda namun prinsip-prinsip demokrasi itu tetap dimilikinya dengan ungkapan yang sesuai dengan bahasa daerahnya masing-masing.

Di lingkungan sekolah berdasarkan pengamatan selama ini prinsip-prinsip demokrasi itu adakalanya tidak dilaksanakan, seperti dalam pemilihan ketua kelas, dan membuat peraturan sekolah dimana putusan sering diambil dengan suara terbanyak, bahkan ada yang tidak demokrasi sama sekali seperti penunjukan dan penetapan kepala sekolah. Dalam pembelajaran, waktu dan kegiatan pembelajaran banyak dimonopoli oleh guru dan hanya sedikit sekali kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk ambil bagian (Isnarmi, dkk, 2008)

Kenyataan lain dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa dan negara Indonesia ditemui praktek demokrasi yang beraneka ragam bahkan ada masa dimana demokrasi itu hanya simbol dalam kehidupan sedangkan dalam kenyataan dinilai tidak demokratis. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa pada era Orde Lama (1959- 1965) dalam sistem penyelenggaraan negara dikenal dengan Demokrasi Terpimpin tetapi dalam kenyataan prinsip-prinsip demokrasi terkekang. Begitu juga pada Era Orde Baru negara Indonesia menggunakan demokrasi Pancasila dalam sistem pemerintahan negara tetapi di ujung pemerintahan Orde Baru terkesan prinsip-prinsip demokrasi itu hanya terlihat di

permukaan, sementara bila dilihat lebih jauh prinsi-prinsip demokrasi tadi tidak dilaksanakan. Di bidang pendidikan kebijakan yang dijalankan adalah depolitisasi pendidikan seperti guru sebagai anggota Korpri tidak boleh berpolitik kecuali memilih Golkar, organisasi ekstra pelajar dilarang, mahasiswa tidak boleh berpolitik praktis, organisasi ekstra mahasiswa dilarang di kampus, dan sebagainya (Zamroni, 1998).

Sekarang di Era Reformasi yang ditandai dengan demokratisasi sebagai koreksi atas praktek pemerintahan Orde Baru ditemui beberapa fenomena yang dapat mengaburkan arti demokrasi. Hampir di seluruh daerah Indonesia sebagian kalangan masyarakat termasuk mahasiswa dan siswa dalam menyampaikan keinginannya berdemonstrasi, dimana ”intinya bebas memaksakan kehendak kelompoknya dengan tekanan kekerasan” (Zamroni, 1998). Kondisi memaksakan kehendak yang dibarengi dengan kekerasan itu bukan hanya terjadi dalam kehidupan masyarakat awam tetapi juga dalam lingkungan lembaga pendidikan. Banyak siswa dan mahasiswa perguruan tinggi di berbagai daerah di Indonesia menyampaikan aspirasinya yang diikuti dengan tindakan kekerasan. Di awal tahun 2008 sudah tercatat dua perguruan tinggi yang melakukan unjuk rasa yang berakibat kerugian besar bagi negara seperti yang terjadi di kota Medan dan Ujung Pandang. Berbagai kejadian yang muncul dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu menimbulkan kesan bahwa demokrasi itu adalah kebebasan untuk berbicara dan berbuat bila perlu dengan kekerasan. Hal ini merupakan indikator kurang berhasilnya pendidikan kewarganegaraan. Dalam pembelajaran ada dua hal utama yang sangat menentukan keberhasilannya yaitu materi pembelajaran yang diberikan dan proses pembelajaran yang dilaksanakan. Penelitian ini difokuskan pada kajian materi pembelajaran yang diberikan di sekolah. Materi pembelajaran PKn yang baik akan

memberikan pemahaman akan konsep-konsep hak, kewajiban dan tanggung jawab bagi setiap warga negara dan dengan konsep itulah mereka bersikap dan bertindak laku. Pertanyaan yang dapat dimunculkan sekarang adalah apakah materi yang dikonstruksi oleh guru sudah sesuai dengan tuntutan Pendidikan Kewarganegaraan berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan? Persoalan ini perlu dikaji lebih jauh sehingga masalah-masalah dalam pembelajaran PKn itu makin hari makin bisa dipecahkan.

Hasil penelusuran yang dilakukan baik dari pengamatan langsung ataupun penelitian terdahulu terlihat masih sedikit sekali bahkan nyaris tidak ditemukan penelitian tentang ini.

B. Masalah dan Fokus Penelitian

Pengembangan pengetahuan, pembentukan sikap dan perilaku demokrasi di sekolah melalui pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha terencana untuk terwujudnya sikap dan perilaku demokrasi siswa dan merupakan bekal memasuki perguruan tinggi dan masyarakat. Usaha tersebut terutama menyangkut pelaksanaan tugas guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu mengkonstruksi materi pembelajaran dan melaksanakan proses pembelajaran. Bertolak dari latar belakang masalah dan tugas guru PKn serta keterkaitannya dengan faktor-faktor yang menentukan pembentukan pengetahuan, sikap dan perilaku demokrasi tersebut maka penelitian ini dibatasi pada bagaimana guru mengembangkan atau mengkonstruksi materi pembelajaran yang akan digunakannya dalam proses pembelajaran di Sekolah Menengah Atas Kota Padang dan bagaimana pula gambaran materi tersebut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Bertolak dari latar belakang, dan rumusan masalah atau fokus penelitian yang dikemukakan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menemukan gambaran konstruksi materi pembelajaran PKn di SMA Kota Padang dan bentuk kegiatan dalam mengkonstruksi tersebut.

2. Manfaat penelitian

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan konstruksi materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah, dalam rangka pembentukan prilaku demokratis sehingga upaya yang dilakukan benar-benar mampu membentuk pengetahuan, sikap dan prilaku demokratis sesuai dengan tujuan pendidikan kewarganegaraan di sekolah. Selain dari itu hasil penelitian ini juga menjadi masukan yang berarti bagi pemerintah dalam upaya mewujudkan cita-cita reformasi yaitu terwujudnya masyarakat yang demokratis. Sebagaimana layaknya suatu penelitian diharapkan hasilnya dapat menambah khasanah ilmu pendidikan khususnya tentang pendidikan kewarganegaraan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisikan teori-teori dan pendapat yang dimuat dalam tulisan para ahli tentang materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

A. Pendidikan Kewarganegaraan dan tujuannya

Civic Education atau Pendidikan Kewarganegaraan (PKn.) adalah suatu program pendidikan yang bertujuan mendidik warganegara yang baik (*good citizenship*). Program ini dilingkungan sekolah diimplementasikan sebagai salah satu mata pelajaran dalam kurikulum mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai dengan jenjang pendidikan tinggi. Untuk pendidikan dasar dan menengah di Indonesia sudah dimulai sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan nama yang sudah berubah-ubah (Hermana Somantrie(2006:21). Dalam kurikulum 1957/1962 diberi nama Civics, kemudian dalam kurikulum 1964 dengan nama Pendidikan Kemasyarakatan yang merupakan integrasi pelajaran Sejarah, Ilmu Bumi, dan Kewarganegaraan. Pada tahun 1968 diberlakukan kurikulum 1968/ 1969 sebagai pengganti kurikulum 1964. Dalam kurikulum tersebut Pendidikan kemasyarakatan ditukar namanya dengan Pendidikan Kewargaan Negara yang merupakan perpaduan Ilmu Bumi, Sejarah Indonesia, dan Civics. Nama tersebut berubah lagi dengan Pendidikan Kewargaan Negara, dan Civics Hukum melalui kurikulum 1973.

Tahun 1975 melalui kurikulum 1975 Pendidikan Kewargaan Negara, dan Civics Hukum diubah lagi menjadi Pendidikan Moral Pancasila. Menurut Kosasih Jahiri (1979) Pendidikan Moral Pancasila bertujuan mewujudkan warga negara yang baik yang dilandasi oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian melalui kurikulum 1984 Pendidikan Moral

Pancasila diperjelas lagi dimana 36 butir Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P.4) dijadikan tujuan Instruksional. Pembaharuan kurikulum dilakukan lagi tahun 1994 dimana Pendidikan Moral Pancasila ditukar namanya dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Sejalan dengan dinamika perkembangan kehidupan bangsa dan negara yang ditandai dengan semakin terbukanya persaingan antar bangsa dan arus globalisasi, menuntut bangsa Indonesia memasuki era reformasi diberbagai bidang kehidupan masyarakat yang lebih demokratis. Mengikuti tuntutan Era reformasi tersebut di bidang pendidikan dilakukanlah perubahan kurikulum yang implementasinya PPKn dirubah menjadi PKn dalam kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang implementasinya secara terbatas dimulai sejak tahun 2001. Senada dengan tuntutan reformasi pembenahan kurikulum sekolah terus dilakukan. Sekarang diberikan kewenangan yang lebih banyak kepada sekolah untuk menyusun kurikulumnya masing-masing dengan tetap berpegang pada rambu-rambu yang ditetapkan secara nasional. Kebijakan ini melahirkan Kurikulum Tingkat Satuan Pembelajaran (KTSP).

Walaupun telah terjadi penukaran nama berkali-kali namun intinya tetap tidak hilang yaitu: membentuk peserta didik menjadi warganegara yang baik dan bertanggung jawab dalam negara yang demokratis serta membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Hermana Somantrie(2006:22). Perjalanan masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia yang berubah menuju masyarakat madani (*Civil Society*) menuntut pula adanya penyesuaian Pendidikan Kewarganegaraan dengan masyarakat yang berubah tersebut. Revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan itu diarahkan kepada pembentukan karakter bangsa (*national character building*) yang mengarah pada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral (Sapriya dan Udin S.Winataputra, 2006:1.1) Selanjutnya dikemukakan oleh Sapriya dan Udin S.Winataputra (2006:1.1-1.2) bahwa tugas PKn. dengan paradigma baru adalah mengembangkan pendidikan demokrasi yang mengemban tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warganegara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga Negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warganegara (*civic participation*). Kecerdasan yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial sehingga paradigma PKn bercirikan multidimensional). Hal ini ditegaskan dalam bagian latar belakang kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) pragraf kelima sebagai berikut:

Indonesia harus menghindari sistem pemerintahan otoriter yang memasung hak-hak warga negara untuk menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehidupan yang demokratis di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintahan, dan organisasi-organisasi non-pemerintahan perlu dikenal, dipahami, diinternalisasi, dan diterapkan demi terwujudnya 232 pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi. Selain itu, perlu pula ditanamkan kesadaran bela negara, penghargaan terhadap hak azasi manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup, tanggung jawab sosial, ketaatan pada hukum, ketaatan membayar pajak, serta sikap dan perilaku anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.

Keberhasilan pendidikan kewarganegaraan dalam pembentukan sikap dan perilaku demokrasi ditentukan oleh banyak pihak disamping faktor guru dan siswa diantaranya adalah lingkungan masyarakat dan pemerintah. Oleh karenanya perlu ditingkatkan.

Di Negara-negara maju seperti Amerika Serikat peran pemerintah tersebut cukup besar. Di Amerika Serikat peran pemerintah (misalnya Presiden George.W.Bush dan Congress) dan lembaga-lembaga lain seperti Center Civic Education, Pew Partnership for Civic Change, Mc Cormic Tribune Foundation, National Strategy Forum cukup besar (R. Freeman Butts in John J.Patrick and Robert S.Leming, 2001.)

Dari uraian di atas terlihat bahwa pada hakekatnya pendidikan kewarganegaraan itu adalah mengangkat harkat dan martabat manusia. Harkat dan martabat manusia menurut Prayitno (2008) melingkupi manusia, dimensi kemanusiaan, dan Pancadaya. Manusia adalah makhluk yang bertaqwa, paling sempurna dalam penciptaannya, paling tinggi derajatnya, khalifah dimuka bumi dan penyandang HAM. Dimensi kemanusiaan terdiri dari dimensi kefitrahan, keindividualan, kesosialan, kesusilaan, dan keberagaman. Sedangkan Pancadaya terdiri dari daya taqwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa, daya karya. Prinsip demokrasi yang dikembangkan dalam pendidikan kewarganegaraan itu tidak lain adalah nilai-nilai yang terkait dengan harkat dan martabat manusia seperti yang diungkapkan Prayitno tersebut.

Penyelenggaraan pembelajaran PKn bila mengacu kepada pendapat Prayitno menyangkut dengan kewiyataan (*High Tech*) yang terdiri dari: materi pembelajaran, metoda pembelajaran, alat bantu pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran.

B. Materi Pendidikan Kewarganegaraan

Materi yang dikaji dalam pendidikan kewarganegaraan atau *civic education* di berbagai negara menunjukkan adanya perbedaan. Di Amerika Serikat walaupun penjabarannya di berbagai tingkat pendidikan berbeda tetapi pokok-pokok materinya

bersumber dari rumusan yang digariskan oleh *Center for Civic Education funded by the U.S. Department of Education and The Pew Charitable Trusts*. Rumusan tersebut telah dirinci ke dalam tingkatan pendidikan. Khusus untuk tingkat SLTA (K.9-12) seperti terlihat dalam Tabel 1

Di negara Australia *Civic education* dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah setelah dikembangkan melalui program *Discovering Democracy*. Murray Print (2001: 213) mengemukakan bahwa :

... the program proposed that students should (1) gain knowledge and understanding of Australia's democratic processes, government, and judicial system and of the nation's place in the international community; (2) understand how participation and decision-making operate in contemporary Australia, and how the nation's civic life might change in the future; (3) develop personal character traits such as respecting individual worth and human dignity, empathy, respect for the law, being informed about public issues, critical mindedness, and willingness to express points of view, listen, negotiate and compromise; (4) understand how our system of government works in practice , and how it affects citizens; and (5) understand the rights and responsibilities of citizens, and the opportunities for exercising them at local, state, and federal levels (Curriculum Cooperation 1998).

Setelah beberapa pertimbangan subjek mater dari *Discovering Democracy* selesai diidentifikasi ditemukan empat tema pembelajaran civic yaitu:

In Australia, Four subject matter themes provide the construct for civics: (1) Who rules? – How power has evolved and exercised within Australia's democratic system as well as the rights and responsibilities of citizens and the principles underlying Australian democracy; (2) Law and Rights – the rule of law, its origins in Australia and how laws are made including the role of constitutions, parliaments and courts; (3) the Australian Nation- the establishment of Australias democratic institutions and how civic identity has changed over time in our nation; and (4) Citizens and Public Life – the ways people participate in Australia's civil society, particularly how people can effect change within our democracy (2001; 214).

Tabel 1
National Standards for Civics and Government
K. 9-12 Content Standards

No	Content
1	<p>What are Civic Life, Politics, and Government?</p> <p>A. What is civic life? What is politics? What is government? Why are government and politics necessary? What purposes should government serve?</p> <p>B. What are the essential characteristics of limited and unlimited government?</p> <p>C. What are the nature and purposes of constitutions?</p> <p>D. What are alternative ways of organizing constitutional governments?</p>
2	<p>What are the Foundations of the American Political System?</p> <p>A. What is the American idea of constitutional government?</p> <p>B. What are the distinctive characteristics of American society?</p> <p>C. What is American political culture?</p> <p>D. What values and principles are basic to American constitutional democracy?</p>
3	<p>How Does the Government Established by the Constitution Embodiy the Purposes, Values, and Principles of American Democracy?</p> <p>A. How are power and responsibility distributed, shared, and limited in the government established by the United States Constitution?</p> <p>B. How is the national government organized and what does it do?</p> <p>C. How are state and local governments organized and what do they do?</p> <p>D. What is the place of law in the American constitutional system?</p> <p>E. How does the American political system provide for choice and opportunities for participation?</p>
4	<p>What is the Relationship of the United States to Other Nations and to World Affairs?</p> <p>A. How is the world organized politically?</p> <p>B. How do the domestic politics and constitutional principles of the United States affect its relations with the world?</p> <p>C. How has the United States influenced other nations, and how have other nations influenced American politics and society?</p>
5	<p>What are the Roles of the Citizen in American Democracy?</p> <p>A. What is citizenship?</p> <p>B. What are the rights of citizens?</p> <p>C. What are the responsibilities of citizens?</p> <p>D. What civic dispositions or traits of private and public character are important to the preservation and improvement of American constitutional democracy?</p> <p>E. How can citizens take part in civic life?</p>

Sumber : *Center for Civic Education*

Menurut Print (1999) secara spesifik ciri-ciri utama pendidikan kewarganegaraan baru diberbagai negara adalah sebagai berikut: *a) rights and responsibilities of citizens; b) government and institutions; c) history and constitutions; d) national identity; e) legal*

system and rule of law; f) human, political, economic and social rights; g) democratic and principles and processes; h) active citizen participation in civic issues; i) international perspectives, and; j) values of democratic citizenship.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh konsorsium lembaga penelitian pendidikan dari 53 negara yang berkedudukan di Amsterdam “ *The Internastional Association for the Evaluation of Education Achievement (IEA)*” tentang pendidikan kewarganegaraan (Quigley, 2000) sebagaimana dikutip Hermana (2006:24) menyimpulkan bahwa “ *There is a common core of topics across countries in civic education. There is unanimity among authors of the national case studies that civic education should be: (1) based on important content that crosses disciplines; (2) participative; (3) interactive ; (4) related to life; (5) conducted in a nonauthoritarian environment; (6) cognizant of the challenges of social diversity, and (7) constructed with the parents, the community and non governmental organizations as well as the school*”.

Bahan kajian pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) diberbagai negara kelihatannya memiliki penekanan yang berbeda. Hermana Somantrie (2006:23) menyimpulkannya ke dalam 4 kategori yaitu: a) pendidikan kewarganegaraan dengan bahan kajian pemerintahan, konstitusi, lembaga-lembaga, peraturan hukum, dan hak-hak dan tanggung jawab warga negara; b) *civics* atau *citizenship education* dengan penekanan pada proses demokrasi, partisipasi aktif waga negara, dan persepakatan orang-orang dalam masyarakat madani; c) pendidikan kewarganegaraan dengan bahan belajar yang terkait dengan kelembagaan dan system yang mencakup pemerintahan, warisan politik, proses demokrasi, hak dan keawajiban warga negara, administrasi negara dan system peradilan; d) pendidikan kewarganegaraan dengan suatu himpunan keterampilan atau

proses yang terkait dengan pengetahuan, seperti kemampuan menyelesaikan masalah, refleksi kritis, berfikir kritis, inkuiri, dan kerjasama. Selain itu juga ditambah dengan keadilan sosial, pemahaman multi dan intercultural, dan keberlanjutan ekologi. Selanjutnya dikemukakan bahwa Pendidikan kewarganegaraan yang efektif bagi masyarakat demokratis menurut Patrick (2001:41) ditandai dengan empat komponen utama yaitu:

- a. Knowledge of Citizenship and Government in Democracy:
 1. Concepts on the substance of democracy.
 2. Ongoing tensions that raise public issues.
 3. Constitution and institutions of democratic government
 4. Functions of democratic institutions.
 5. Practices of democratic citizenship and the roles of citizens.
 6. Contexts of democracy: cultural, social, political, and economic.
 7. History of democracy in particular states and throughout the world.
- b. Cognitive Skills of Democratic Citizenship:
 1. Identifying and describing phenomena or events of political and civic life.
 2. Analyzing and explaining phenomena or events of political and civic life.
 3. Evaluating, taking, and defending positions on public events and issues.
 4. Making decisions on public issues.
 5. Thinking critically about conditions of political and civic life.
 6. Thinking constructively about how to improve political and civic life.
- c. Participatory Skills of Democratic Citizenship:
 1. Interacting with other citizens to promote personal and common interests.
 2. Monitoring public events and issues.
 3. Influencing policy decisions on public issues.
 4. Implementing policy decisions on public issues.
- d. Virtues and Dispositions of Democratic Citizenship:
 1. Promoting the general welfare or common good of the community.
 2. Recognizing the equal moral worth and dignity of each person.
 3. Respecting and protecting rights possessed equally by each person.
 4. Participating responsibly and effectively in political and civic life.
 5. Taking responsibility for government by consent of the governed.
 6. Becoming a self-governing person by practicing civic virtues.
 7. Supporting and maintaining democratic principles and practices.

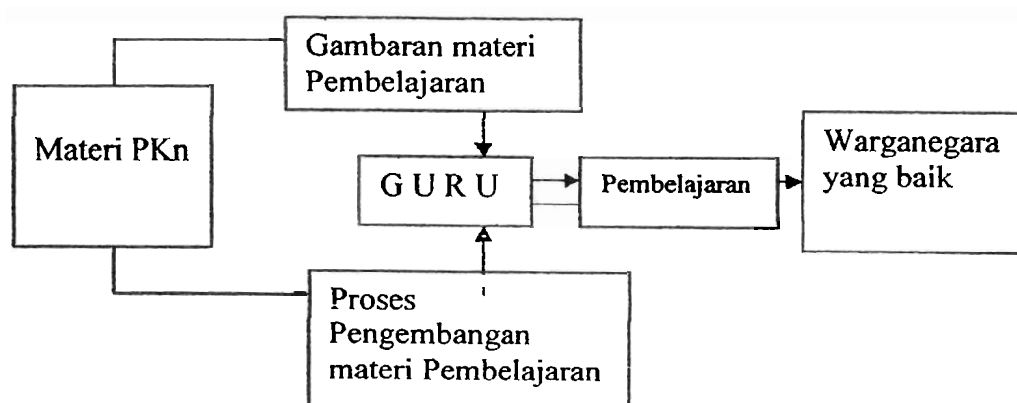
Semua hal yang tercakup ke dalam empat komponen tersebut merupakan inti dari pendidikan kewarganegaraan yang demokratis yang pada hakekatnya mencakup konsep-

konsep dasar yang harus diketahui oleh warga Negara dan mampu digunakan (bersikap dan berperilaku) yaitu menyangkut dengan apa, bagaimana, dan kenapa demokrasi dilaksanakan.

Perubahan kurikulum di Indonesia pada dasarnya memberikan peluang yang lebih besar kepada sekolah untuk dapat mengembangkan prinsip-prinsip kurikulum yang telah ditetapkan secara nasional. Pemerintah pusat hanya memberikan petunjuk dan menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dari mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pengembangan Kompetensi dasar ke dalam bentuk indikator, bahan ajar, media, alat evaluasi dsb. dilaksanakan oleh guru bidang studi dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Pendekatan yang digunakan tentunya pola berfikir deduktif.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 3 : Kaitan materi pembelajaran dengan pembentukan warganegara yang baik



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-interpretivisme dengan metode deskriptif. Jenis penelitian ini dipilih mengingat masalah yang diteliti tidak hanya menyangkut dengan substansi atau hasil tetapi juga berupa rangkaian proses mengembangkan materi pembelajaran. Disamping itu fokus penelitian ini saling terkait yang sulit dipilah satu sama lain, oleh karena itu tinjauannya harus holistik dan mendalam. Pertimbangan-pertimbangan itulah yang mendorong peneliti untuk menggunakan pendekatan kualitatif. Namun demikian beberapa bagian dari penelitian ini juga akan menggunakan prinsip penelitian kuantitatif seperti penentuan sekolah yang akan dijadikan obyek penelitian.

B. Lokasi dan Setting Penelitian

Penelitian dilakukan di kota Padang, ibu kota Provinsi Sumatera Barat pada SMA Negeri dan Swasta. Kesemua SMA Negeri tersebut digolongkan ke dalam SMA Unggul, Pra unggul dan SMA biasa. Kriteria pengelompokan disesuaikan dengan data dari Dinas Pendidikan Kota Padang.

Dari setiap guru yang dijadikan informan diperoleh informasi tentang materi pembelajaran dan proses pengembangan materi tersebut melalui wawancara mendalam serta dokumen yang dimilikinya. Semua data yang diperoleh melalui kegiatan tersebut dianalisis sesuai dengan teknik analisis yang telah ditetapkan.

C. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan informasi awal dilakukan *grand-tour* untuk menjajaki dan menilai keadaan lapangan. Tahap ini di samping langkah untuk menemukan informan kunci juga mendapatkan data pendukung proposal. Hasil *grand-tour* juga memberikan gambaran tentang informan penelitian. Sumber informasi (Informan) dalam penelitian ini adalah:

1. Manusia yang terdiri dari: guru-guru Pendidikan Kewarganegaraan, pengurus MGMP, Pengawas sekolah (*school supervisor*). Banyaknya informan ditentukan berdasarkan prinsip kejenuhan informasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Glaser dan Straus (1974: 61). Maksudnya pencarian informasi/ data yang diperlukan dari informan akan berhenti bila tidak ada lagi informasi baru yang dapat diserap. Teknik penarikan informan adalah *purposive sampling*. Teknik ini digunakan dengan dasar/ pertimbangan bahwa semua informan yang disebutkan diasumsikan paling mengetahui dan atau mempunyai informasi tentang materi pembelajaran PKn tersebut.
2. Dokumen yang terdiri dari: Silabs mata pelajaran, Rencana Program Pembelajaran (RPP), buku teks, dan lembaran kerja siswa (LKS).

Penelitian dilaksanakan selama lebih kurang tiga bulan.

D. Teknik dan alat Pengumpul Data

Sumber data penelitian ini dapat dibedakan atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan informan serta diskusi kelompok. Sedangkan data sekunder diambil dari dokumentasi yang berkaitan dengan materi pembelajaran PKn.

Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan studi dokumen.

Bentuk wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur/formal dan tidak terstruktur, tergantung sifat data yang dikumpulkan. Peneliti mewawancarai : guru PKn, pengawas sekolah, dan ketua MGMP di Kota Padang.

Dokumen merupakan sumber data yang penting dalam penelitian ini.

Diantara dokumen yang akan dikaji adalah Rencana Pelaksanaan Program (RPP), LKS, Buku Paket, dan lembaran-lembaran lain yang terkait dengan materi pembelajaran PKn. Setelah data wawancara dan dokumen diolah dilakukan Diskusi Kelompok Terfokus.

Diskusi Kelompok terfokus (*focus group discussion*) merupakan salah satu cara untuk memperoleh deskripsi yang lebih rinci dan jelas tentang materi pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat Morgan dalam Pottas (2005) bahwa *focus group discussion* dapat dilakukan untuk memperoleh berbagai data dan referensi permasalahan penelitian yang sedang dibahas.

Alat pengumpul data dalam penelitian ini di samping buku-buku catatan.

E. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Data yang dikumpulkan diuji dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Menurut Patton triangulasi dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu 1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan beberapa teknik pengumpulan data, 2) pengecekan derajat kepercayaan melalui beberapa sumber data dengan metode yang sama (Moleong, 2000: 178). Pada penelitian ini, digunakan kedua strategi triangulasi itu yaitu pengecekan keabsahan data hasil observasi dengan wawancara dan dokument atau hasil

wawancara antara satu informan dengan informan lain dan antara teknik wawancara dengan atau dokumen.

F. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan teknik pengumpulan data di atas diolah dengan teknik kualitatif. Langkah utama adalah membuat klasifikasi yaitu merumuskan kategori-kategori yang terdiri dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama sampai kepada penafsiran arti dari jawaban (Vredenberg, 1981: 126-129). Penafsiran atau interpretasi data merupakan proses pemberian makna pada analisis dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Model yang digunakan dalam analisis adalah model interaktif seperti yang digambarkan oleh Miles dan Huberman yang rinciannya secara ringkas sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang terkumpul dalam penelitian direduksi guna menajamkan analisis, menonjolkan hal-hal yang penting, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak dibutuhkan, dan mengorganisasikan data agar lebih sistematis, sehingga dapat dibuat suatu kesimpulan yang bermakna.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penggambaran dari keseluruhan kelompok data yang diperoleh agar mudah dibaca secara menyeluruh sehingga peneliti dapat memahami jawaban dari permasalahan yang diteliti.

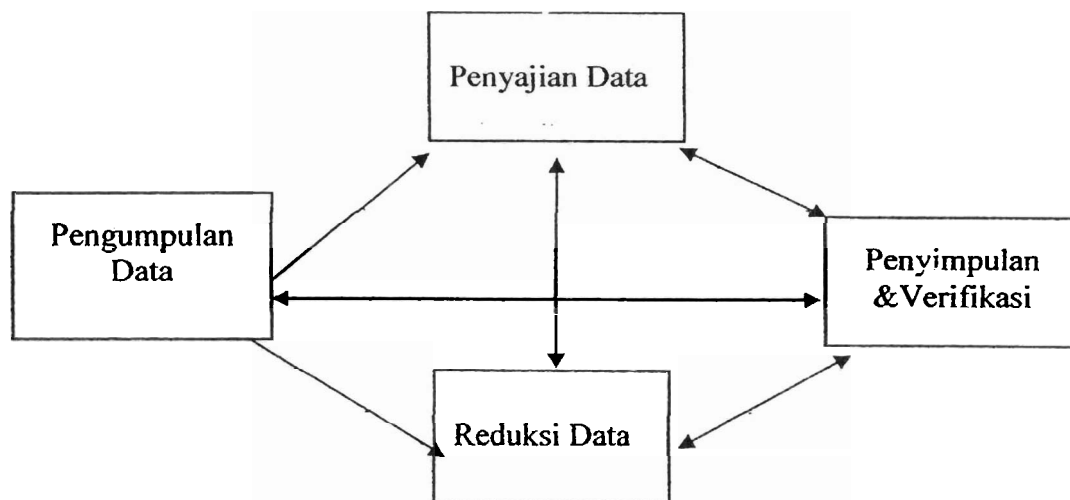
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Data yang telah diperoleh dan diolah disimpulkan sesuai dengan klasifikasi data menuju suatu konfigurasi yang utuh. Simpulan itu selalu diarahkan kepada fokus penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Merumuskan Temuan

Temuan-temuan yang diperoleh dari penarikan kesimpulan melalui analisis data, dirumuskan menjadi temuan umum dan temuan khusus. Sesuai dengan kebiasaan dalam penelitian kualitatif kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi dilaksanakan secara bersamaan (sejalan) selama kegiatan pengumpulan data dalam suatu proses siklus. Cara ini dilaksanakan secara terus menerus sampai data yang terkumpul dinilai telah memadai untuk menjawab permasalahan penelitian. Proses analisis tersebut di atas dapat digambarkan sebagai terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 6
Proses Analisis Data



BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum SMA Kota Padang

SMA Kota Padang dapat dilihat dari berbagai sudut diantaranya dari pengelolaannya dapat dibedakan atas sekolah negeri dan swasta. SMA negeri berjumlah 16 buah dan sekolah swasta 40 buah. Dari sudut standar pengelolaannya dapat dibedakan sekolah bertaraf internasional (SBI), SMA berstandar nasional (SSN), dan SMA biasa. Sekolah berstandar nasional ini berjumlah 4 buah yaitu SMA negeri 2, SMA negeri 3, SMA negeri 4, dan SMA negeri 9. Sekolah bertaraf internasional sebanyak 3 buah yaitu: SMA Negeri 1 Padang, SMA negeri 10 Padang, dan SMA Don Bosco Padang (wawancara dengan Ferdinand, Februari 2010). Sebelum adanya pengelompokan berdasarkan standar tersebut, dikenal pula pengelompokan berdasarkan tingkat keunggulannya terdiri dari sekolah unggul, pra unggul, dan sekolah biasa. Pada sekolah unggul inputnya relatif lebih baik jika dibandingkan dengan sekolah tidak unggul. Bahkan prediket unggul itu lebih banyak ditentukan oleh inputnya dibandingkan dengan pelaksanaan proses pembelajaran. Umumnya sekolah-sekolah yang berada di pusat kota seperti SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 10, dan SMA Don Bosco dipandang sebagai sekolah unggul karena memiliki kelas unggul atau siswa yang dinilai unggul dalam inputnya. Dari segi letak sekolah dapat dibedakan atas SMA pusat kota dan SMA di pinggir kota. Sekolah pusat kota pada umumnya memiliki kualitas lulusan yang lebih baik dibandingkan dengan sekolah pinggiran kota. Salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah input dan fasilitas belajar. Input siswa sekolah pusat kota umumnya baik yaitu memiliki ranking rata-rata 10 besar di SMP asalnya atau dari SMP favorit seperti SMP N.1, SMP N.2,

SMPN.7, dan SMPN. 8. Sedangkan SMA di pinggir kota input umumnya memiliki NEM rata-rata dibawah SMA pusat kota, bahkan biasanya siswa yang NEM nya rendah tersebut tidak mau mendaftar di SMA pusat kota dan mereka memilih mendaftar di SMA pinggiran kota. Fasilitas belajar juga relatif kurang lengkap dibandingkan dengan SMA di pusat kota. Hal ini diduga disebabkan karena tidak begitu kuatnya Komite sekolah. Komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan dengan manajemen berbasis sekolah (MBS) memegang peranan penting. Komite sekolah umumnya berupaya melengkapi fasilitas belajar yang ada di sekolah.

Sekolah menengah atas pusat kota adalah SMA negeri N0. 1, 2, 3, 4,10, SMA PGRI, SMA Don Bosco, SMA Adabiyah, SMA Kalam Kudus, SMA Pertiwi, SMA Bunda, dan SMA Pembangunan. Selain dari sekolah-sekolah tersebut dapat digolongkan kepada sekolah di pinggir kota. Jumlah siswa disuatu sekolah tidak sama dengan siswa ditempat lain. Tetapi jumlah siswa dalam satu kelas hampir bersamaan yaitu sekitar 40 orang satu kelas.

B. Mata Pembelajaran dan Guru PKn di Kota Padang

Mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah baik negeri ataupun swasta diberikan pada semua kelas mulai dari kelas X sampai dengan kelas XII. PKN adalah mata pelajaran yang bertujuan membentuk warga negara yang baik yang menyadari hak dan kewajibannya serta melaksanakan hak dan kewajibannya itu secara baik pula. Masing-masing kelas disediakan waktu pembelajaran selama dua jam pelajaran (80 menit) setiap minggu. Selama 2 jam pelajaran itulah guru PKn

dapat menyampaikan materi pelajaran yang telah di persiapkan sebelumnya guna mencapai tujuan pembelajaran.

Guru-guru PKn di SMA Kota Padang sampai dengan penelitian ini dilakukan (awal 2010) berjumlah 117 orang yang tersebar di semua sekolah menurut besar kecilnya sekolah. Gambaran yang lebih jelas dapat dilihat pada lampiran 1. Tingkat pendidikan guru-guru PKn. pada umumnya S.1 dan hanya 3 orang saja yang berlatar belakang pendidikan S.2 ataupun Sarjana Muda (SM). Pangkat guru-guru umumnya golongan IV/a seperti terlihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1 Gambaran guru PKn menurut golongan

No	Golongan	Jumlah	Persentase
1	IV.b	-	0
2	Iv.a.	58	49,57
3	III. d.	7	5,98
4	III. c	3	2,56
5	III. b	3	2,56
6	III.a	7	5,98
7	-	39	33,33
	Jumlah	117	

Masih banyak jumlah guru yang belum memperoleh pangkat dan golongan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku seperti terlihat apada tabel diatas. Umumnya guru yang belum mempunyai pangkat dan golongan tersebut masih berstatus guru honor atau guru yang diangkat oleh yayasan yang mengelola sekolah tersebut. Jumlah guru terbesar (49,54 %) sudah berpangkat golongan IV yang berarti telah senior dan mempunyai pengalaman yang cukup banyak dalam melaksanakan pembelajaran. Selain itu masih ada pula guru yang belum mencapai standar yang ditentukan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 di atas.

Jumlah guru PKn untuk sekolah menengah atas kota Padang sudah lebih dari cukup. Rata-rata untuk SMA Negeri memiliki 4 orang guru dan SMA swasta rata-rata 2 orang guru. Beban mengajar guru relatif lebih kecil dari jam wajib mengajar guru (24 jam / minggu). Untuk memenuhi jumlah wajib mengajar guru tersebut pada umumnya di sekolah-sekolah kota Padang telah melaksanakan sistem *team teaching* (Ferdinan, wawancara Februari 2010). Gambaran guru PKn dimasing-masing sekolah kota Padang dapat dilihat dalam lampiran.

Masa kerja guru umumnya diatas 10 tahun dan hanya 21 orang atau 17,95 % saja yang berada pada posisi 10 tahun ke bawah. Ini menunjukkan guru-guru yang mengajar di SMA Kota Padang tergolong guru-guru senior yang kaya dengan pengalaman. Gambaran lebih rinci dari masa kerja guru seperti terlihat pada tabel 3 dibawah ini.

Tabel 3 Gambaran guru PKn.menurut Masa Kerja

No	Lama masa kerja	Jumlah	Persentase
1	> 30 tahun	5	4,27
2	26 – 30 tahun	28	23,93
3	21 – 25 tahun	19	16,24
4	16 – 20 tahun	15	12,82
5	11 – 15 tahun	29	24,79
6	6 – 10 tahun	7	5,98
7	< 6 tahun	14	11,97
	Jumlah	117	100

Umur guru-guru PKn kota Padang pada umumnya di atas 30 tahun bahkan jumlah terbanyak itu antara 36 sampai dengan 50 tahun yaitu sekitar 80 %. Jumlah ini menunjukkan bahwa guru-guru memiliki umur yang energik. Gambaran lebih rinci dapat dilihat dari tabel 4 di berikut ini.

Tabel 4. Gambaran guru PKn. Kota Padang menurut Umur

No	Umur menurut tahun	Jumlah	Persentase
1	> 55	11	9,40
2	51 – 55	16	13,68
3	46 – 50	30	25,64
4	41 – 45	29	24,79
5	36 – 40	21	17,95
6	31 – 35	8	6,84
7	26 – 30	1	0,85
8	< 26	1	0,85
	Jumlah	117	100

C. Materi Pembelajaran PKn

1. Proses Pengembangan materi pembelajaran

Materi pokok pembelajaran PKn dikembangkan oleh guru mata pelajaran dengan mempedomani standar kompetensi dan kompetensi dasar yang ditetapkan secara nasional. Dengan demikian pokok-pokok materi tersebut tidak jauh berbeda pada satuan pembelajaran di seluruh Indonesia. Sesuai dengan sistem pendidikan nasional Indonesia saat ini yang berkenaan dengan kurikulum dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum tersebut dikembangkan di sekolah dan diwadahi dengan KKG serta di tingkat daerah diwadahi oleh MGMP. Di Kota Padang kedua wadah tersebut terlihat sangat berperan dalam pengembangan materi pembelajaran. MGMP PKn. Kota Padang telah berhasil mengembangkan materi pembelajaran itu dan telah sampai ke dalam bentuk modul. Modul atau buku ajar ini dianjurkan dipakai dalam pembelajaran PKn di Kota Padang. Materi pembelajaran PKn SMA Kota Padang dikonstruksi oleh guru dengan mengacu kepada standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan dalam kurikulum. Dari kompetensi dasar

itu dikembangkan lagi indikator dan dari indikator itu dirumuskan tujuan pembelajaran. Pengembangan ke dalam bentuk indikator dan tujuan pembelajaran tersebut dilakukan oleh MGMP sehingga gambaran indikator dan tujuan pembelajaran PKn sama di semua SMA Kota Padang. Proses pengembangan materi pembelajaran dilakukan oleh masing-masing guru di sekolah dengan mempedomani tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan sebelumnya. Dari dokumen yang ada terlihat pengembangan materi pembelajaran lebih banyak mempedomani materi pembelajaran yang ada dalam berbagai buku PKn SMA yang diterbitkan oleh penerbit yang terkenal dan buku-buku teks Perguruan Tinggi yang terkait. Proses berfikir dalam pengembangan materi lebih banyak bersifat deduktif. Tidak banyak materi pembelajaran diambil dari lingkungan kehidupan siswa. Dalam LKS dan buku ajar yang disusun guru-guru yang tergabung dalam MGMP Kota Padang sangat memberikan kesan proses berfikir deduktif tersebut dalam mengembangkan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran kelihatannya tidak didahului dengan menganalisis SK dan KD yang ada dalam kurikulum. Sehingga terkesan pembelajaran itu berupa penuangan materi pembelajaran kepada siswa tanpa diketahui dengan jelas manfaatnya bagi kehidupan siswa. Namun demikian pengembangan materi pembelajaran yang dilakukan guru sudah mengacu kepada kurikulum yang ditetapkan secara nasional.

2. Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran tersebar kedalam 6 semester atau tiga tingkatan kelas.

a. Untuk kelas X materi tersebut mengacu kepada 12 kompetensi dasar. Materi pokok untuk kelas X semester pertama seperti yang dicantumkan dalam silabus PKn. SMA adalah:

- 1) Bangsa dan negara yang meliputi : Hakekat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, hakekat bangsa, unsur-unsur terbentuknya negara yaitu adanya rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain.
- 2) Negara dan bentuk-bentuk kenegaraan, yang meliputi: hakekat negara, asal mula negara, makna penting pengakuan suatu negara dari negara lain, serta bentuk-bentuk kenegaraan.
- 3) Pengertian negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tujuan NKRI yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
- 4) Semangat kebangsaan (nasionalisme dan patriotisme), makna nasionalisme, makna patriotisme dan tatacara menerapkan patriotisme dalam kehidupan.
- 5) Sistem hukum dan Lembaga peradilan yang meliputi: pengertian hukum, tata hukum Indonesia, penggolongan hukum, sumber hukum, serta lembaga-lembaga peradilan.
- 6) Lembaga-lembaga peradilan, yang meliputi: perangkat atau alat kelengkapan lembaga peradilan, klasifikasi lembaga peradilan, tingkat lembaga peradilan, peranan atau tugas dan fungsi lembaga peradilan.
- 7) Sikap yang sesuai dengan hukum yang meliputi: perbuatan-perbuatan yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum, contoh-contoh perbuatan yang melanggar hukum beserta sanksinya.
- 8) Pemberantasan korupsi yang meliputi: pengertian korupsi, dasar hukum pemberantasan korupsi, klasifikasi perbuatan korupsi, serta kasus-kasus korupsi yang telah dikenakan sanksi.
- 9) Peran serta dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang meliputi: macam-macam gerakan atau organisasi anti korupsi, contoh peran serta masyarakat dalam pemberantasan tindak korupsi, serta sikap diri anti korupsi.
- 10) Pemajuan, penghormatan dan penegakan HAM yang meliputi: pengertian dan macam-macam HAM, upaya pemerintah dalam menegakan HAM, instrumen atau dasar hukum yang mengatur HAM dan peran serta masyarakat dalam menegakan HAM.
- 11) Peran serta dalam penegakan HAM di Indonesia yang meliputi: proses pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM; pelanggaran dan penanganan kasus pelanggaran HAM; contoh perilaku pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia
- 12) Instrumen hukum dan peradilan internasional HAM yang meliputi: instrumen HAM internasional, kasus-kasus pelanggaran HAM internasional, proses dan sanksi pelanggaran HAM pada Peradilan Internasional.

Bila diperhatikan materi pembelajaran pada semester pertama terlihat bahwa materi tersebut sudah menjurus kepada terbentuknya warga negara yang memahami hakekat bangsa dan negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam standar kompetensi pertama dalam PKn di SMA. Materi yang terkait dengan demokrasi adalah sistem hukum dan peradilan serta penegakan HAM. Materi ini jelas menunjang pembentukan perilaku demokrasi, kecuali bila guru yang membina pembelajaran ini tidak mengaitkan dengan konsep demokrasi. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip dalam demokrasi. Dibanyak negara demokrasi materi ini juga diberikan dalam pembelajaran PKn.

b. Pada semester kedua ada 10 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh siswa. Untuk mencapai kompetensi itu dikonstruksi materi pembelajaran yang terdiri dari:

- 1) Dasar Negara dan Konstitusi yang meliputi: Pengertian dasar negara, Sejarah terjadinya Pancasila sebagai dasar negara, Fungsi pokok Pancasila, Pengertian konstitusi, Sejarah terjadinya konstitusi negara Indonesia, Fungsi konstitusi, Periodisasi konstitusi, dalam negara RI, Hubungan dasar negara dengan konstitusi
- 2) Substansi konstitusi negara yang meliputi: 1. muatan konstitusi, 2. Sifat – sifat pokok konstitusi negara, Kedudukan konstitusi, Cara pembentukan konstitusi Cara mengubah konstitusi, Amandemen UUD 1945
- 3) Pembukaan UUD 1945 yang meliputi: Kedudukan pembukaan UUD 1945 NKRI yang meliputi: Makna yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, Pokok – pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945
- 4) Perkembangan konstitusi Indonesia yang meliputi: Priode berlakunya konstitusi, fungsi dan tahapan perubahan UUD 1945, kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan, contoh sikap dan perilaku positif terhadap konstitusi negara, serta Perbandingan konstitusi NKRI dengan Negara liberal dan Komunis
- 5) Warga negara dan kewarganegaraan yang meliputi: dasar hukum yang mengatur warga negara, asas dan stelse dalam kewarganegaraan, syarat menjadi warga negara, Cara memperoleh kewarganegaraan di Indonesia serta hal – hal yang menyebabkan kehilangan kewarganegaraan RI.

- 6) **Persamaan kedudukan warga negara yang meliputi:** Makna persamaan kedudukan warga negara, Kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menurut UUD 1945, Pentingnya persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Contoh perilaku yang menampilkan persamaan kedudukan warga negara.
- 7) **Persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku.** Peluang dan hambatan – hambatan untuk mewujudkan prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- 8) **Supra struktur dan infra struktur politik yang meliputi:** Pengertian politik dan sistem politik, Ciri-ciri umum system politik, cara berpolitik melalui supra struktur politik, Infra struktur politik Indonesia,
- 9) **Sistem Politik Indonesia dan sistem politik di berbagai negara yang meliputi:** Dinamika politik di Indonesia, pelaksanaan sistem politik di Indonesia, serta sistem politik negara liberal dan komunis.
- 10) **Peran serta dalam sistem politik di Inonesia yang meliputi:** Pengertian partisipasi politik, Bentuk- bentuk partisipasi politik, Faktor – faktor pendukung partisipasi politik, Perilaku politik yang benar dan bertanggungjawab sesuai aturan, peran serta secara aktif dalam sistem politik di Indonesia dan contoh perilaku politik

Pada semester kedua materi pembelajaran PKn lebih menekankan kepada pengetahuan kenegaraan yaitu tentang struktur kehidupan negara yang diatur oleh konstitusi. Didalamnya dimuat tentang supra struktur politik, infra struktur, hubungan warga negara dengan negara dan peran ideologi negara dalam kehidupan negara tersebut. Berkaitan dengan demokrasi terlihat materi tentang persamaan kedudukan dalam kehidupan negara dan peran serta warga negara dalam kehidupan negara. Hal ini menjadi prinsip dalam pembentukan negara yang demokratis.

c. Materi Ajar untuk kelas XI semester I disusun untuk mewujudkan 11 kompetensi.

Materi tersebut sebagai berikut:

- 1) **Pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi yang meliputi:** macam-macam demokrasi, prinsip-prinsip demokrasi, Pengertian budaya demokrasi, prinsip-prinsip budaya demokrasi.
- 2) **Masyarakat Madani yang meliputi:** pengertian masyarakat madani (civil society), ciri-ciri masyarakat madani, proses menuju masyarakat madani ala Indonesia.

- 3) Demokrasi di Indonesia, meliputi: prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan orde reformasi, pemilihan umum (pemilu) yang menyangkut dengan pengertian, tujuan, prinsip-prinsip dalam pelaksanaan pemilu.
- 4) Prilaku yang mendukung terhadap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.
- 5) Keterbukaan dan keadilan yang meliputi: pengertian keterbukaan dan keadilan, macam-macam keadilan, makna keterbukaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ciri-ciri keterbukaan.
- 6) Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan yang meliputi: Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan, dampak Penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan.
- 7) Sikap keterbukaan dan keadilan yang meliputi: bentuk sikap yang mencerminkan keterbukaan dan keadilan, sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pada semester pertama tahun kedua materi pembelajaran PKn terfokus kepada budaya politik termasuk budaya demokrasi secara umum. Khusus untuk Indonesia digambarkan juga bagaimana kehidupan demokrasi yang diharapkan dalam kehidupan masyarakat dan bagaimana pula realisasi kehidupan demokrasi di Indonesia. Standar kompetensi yang diharapkan dengan materi ini adalah kemampuan menganalisis budaya politik di Indonesia, menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani, kemudian menampilkan sikap keterbukaan dan berkeadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Materi yang terkait dengan prinsip demokrasi dalam membentuk prilaku demokrasi adalah prinsip-prinsip demokrasi, budaya demokrasi, keterbukaan, sikap dan prilaku yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Pada semester ini juga terlihat adanya materi tentang macam-macam keadilan yang juga mendukung terbentuknya prilaku demokrasi, namun materi ini sebaiknya diberikan semester sebelumnya karena menyangkut dengan keadilan dan penegakan hukum lebih banyak dibahas pada semester kedua tahun pertama.

d. Materi untuk semester dua dengan 8 kompetensi dasar sebagai berikut:

- 1) Hubungan Internasional yang terdiri dari pengertian hubungan internasional, pentingnya hubungan internasional bagi suatu negara, dan sarana-sarana hubungan internasional.
- 2) Perjanjian Internasional yang meliputi: makna perjanjian internasional, istilah-istilah perjanjian internasional, dan tahap-tahap perjanjian internasional.
- 3) Perwakilan diplomatik yang meliputi: pengertian perwakilan diplomatik, tingkatan perwakilan diplomatik, dan perwakilan konsuler.
- 4) Organisasi Internasional yang meliputi: pengertian organisasi internasional, macam-macam organisasi internasional, peranan dan tujuan PBB, peranan dan tujuan ASEAN.
- 5) Manfaat kerjasama dan perjanjian internasional yang meliputi: bentuk-bentuk kerjasama dan perjanjian Indonesia dengan negara lain, hasil-hasil kerjasama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia.
- 6) Hukum dan peradilan Internasional yang meliputi: konsep dasar hukum internasional, asas-asas hukum internasional, sumber-sumber hukum internasional, dan lembaga peradilan internasional.
- 7) Sengketa Internasional yang meliputi: sebab-sebab sengketa internasional, cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional – jasa-jasa baik, konsiliasi – komisi penyelidik – pewasitan (arbitrasi) Mahkamah Internasional.
- 8) Mahkamah Internasional yang meliputi: Mekanisme kerja Mahkamah Internasional, dan keputusan Mahkamah Internasional.

Pada semester kedua tahun kedua materi pembelajaran PKn. lebih menekankan kepada hubungan negara dengan negara lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam mewujudkan kehidupan aman, tenteram dan sejahtera dibutuhkan hubungan dan kerjasama dengan negara lain, apalagi dalam era globalisasi. Standar kompetensi yang ingin diwujudkan adalah adanya kemampuan menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional termasuk sistem hukum dan peradilan internasional. Pada semester ini tidak terlihat secara langsung materi yang terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi.

e. Materi pembelajaran kelas XII untuk mencapai 6 kompetensi dasar pada semester I adalah sebagai berikut:

- 1) Pancasila sebagai ideologi terbuka yang meliputi: Rumusan Pancasila, fungsi Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 2) Nilai-nilai Pancasila yang meliputi: Pancasila sebagai sumber nilai, Pancasila sebagai paradigma pembangunan.
- 3) perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka.
- 4) Sistem Pemerintahan yang meliputi: Sistem pemerintahan presidensial dan parlementer, Ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer dan presidensial.
- 5) Sistem Pemerintahan Negara Indonesia yang meliputi: sistem pemerintahan menurut UUD 1945 awal kemerdekaan, sistem pemerintahan menurut UUD 1945 setelah adanya perubahan.
- 6) Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia yang meliputi: kelebihan sistem pemerintahan Indonesia, kekurangan sistem pemerintahan Indonesia, perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain.

Materi semester pertama kelas XII ini lebih banyak membicarakan secara mendalam tentang ideologi Pancasila dan nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Selain dari itu juga membicarakan tentang sistem pemerintahan negara secara umum dan sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945. Untuk melihat ketepatan sistem pemerintahan yang dijalankan di Indonesia juga di perbandingkan dengan sistem pemerintahan negara lain. Pemberian materi ini dengan harapan terbentuknya sikap positif terhadap Pancasila sebagai ideologi terbuka dan kemampuan mengevaluasi sistem pemerintahan negara Indonesia dan negara lain. Dua hal itulah yang menjadi standar kompetensi dari pembelajaran pada semester pertama ini. Materi semester ini lebih banyak menyangkut tentang nilai-nilai yang menjadi dasar moral bagi pelaksanaan prinsip demokrasi.

f. Pada semester dua ada tujuh kompetensi dasar yang materinya sebagai berikut:

- 1) Peranan Pers yang meliputi: pengertian pers, fungsi pers, peranan pers, dan perkembangan pers di Indonesia.
- 2) Kode etik jurnalistik yang meliputi: kode etik, upaya-upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers.

- 3) Kebebasan pers dan dampaknya yang meliputi: dampak dari penyalahgunaan kebebasan pers/ media massa, manfaat media massa dalam kehidupan sehari-hari.
- 4) Globalisasi yang meliputi: proses dan aspek globalisasi, dampak-dampak globalisasi.
- 5) Pengaruh globalisasi dalam bidang : ekonomi, sosial budaya, politik, dan hankam, pengaruh negara lain yang dirasakan Indonesia.
- 6) Implikasi globalisasi terhadap bangsa dan negara Indonesia yang meliputi sikap selektif terhadap pengaruh globalisasi.
- 7) Tulisan tentang globalisasi yang meliputi: langkah-langkah penulisan ilmiah, sistematika penulisan dan presentasi karya tulis.

Jika ditelusuri materi yang ada pada silabus mata pelajaran PKn, ada dua standar kompetensi yang hendak diwujudkan dalam pembelajaran PKn pada semester kedua kelas XII ini yaitu kemampuan mengevaluasi peranan pers dalam masyarakat demokrasi dan dampak globalisasi dalam kehidupan. Materi yang dipersiapkan dalam pembelajaran menyangkut dengan peranan pers, kode etik pers dan kebebasan pers dan dampak-dampak globalisasi baik dalam kehidupan masyarakat, bangsa maupun dalam kehidupan bernegara. Materi semester ini sangat terkait dengan prinsip kebebasan mengemukakan pendapat baik secara lisan ataupun secara tertulis. Prinsip ini inti dalam kehidupan yang demokratis.

Melihat kepada sikap dan perilaku demokrasi siswa sekarang ini, guru-guru PKn SMA kota Padang umumnya menginginkan adanya penambahan materi ajar dalam kurikulum PKn yang sampai saat ini baru disampaikan/disinggung pada saat pembelajaran materi yang terkait. Materi tersebut terutama berkenaan dengan prosedur menyampaikan pendapat dimuka umum, etika menyampaikan pendapat dan berkomunikasi, kesantunan dalam berbicara, serta peran serta siswa dalam negara demokrasi. Dari angket yang diedarkan kepada sampel guru, terlihat bahwa

prosedur menyampaikan pendapat dan etika mendapat persentase cukup tinggi yaitu sekitar 60 %. Gambaran lebih rinci seperti terlihat dalam tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Materi yang perlu ditambahkan terkait dengan perilaku demokrasi

No	Jenis materi pembelajaran	Sampel	F	Persentase
1	Materi tentang prosedur menyampaikan pendapat	30	19	63,33
2	Materi tentang etika menyampaikan pendapat dan berkomunikasi dengan masyarakat	30	18	60
3	Cara menyampaikan pendapat secara santun	30	3	10
4	Budi pekerti	30	1	3,33
5	Peran serta siswa dalam negara demokrasi	30	2	6,67
6	Tidak mengemukakan pendapatnya	30	11	36,67
	Jumlah		30	

D. Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian ada dua hal yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini yaitu proses pengembangan materi pembelajaran dan materi pembelajaran tersebut.

1. Proses Pengembangan materi pembelajaran

Proses pengembangan materi pembelajaran diawali dengan pengembangan SK dan KD kedalam indikator dan tujuan pembelajaran. Sementara SK dan KD ditetapkan secara nasional oleh Departemen Pendidikan nasional melalui komisi kurikulum. Cara ini merupakan cara paling tepat dalam pelaksanaan pembelajaran PKn karena mata pelajaran PKn adalah mata pelajaran yang membentuk pengetahuan dan watak warga negara dalam wadah negara kesatuan

RI. Kesadaran berbangsa dan bernegara akan lebih meningkat melalui pembelajaran PKn ini. Bila penetapan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dilakukan secara sektoral akan menimbulkan perbedaan kurikulum disuatu daerah dengan daerah lainnya. Perbedaan tanpa dukungan kesadaran berbangsa akan memicu konflik dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Dibanyak negara demokrasi seperti Amerika Serikat prinsip ini juga dipakai, misalnya melalui *Center for Civic Education funded by the U.S. Department of Education and The Pew CharitableTrusts*. Sedangkan di Australia melalui program *Discovering Democracy*.

Pengembangan KD ke dalam indikator dan tujuan dilakukan oleh guru dalam wadah MGMP yang keberadaanya dalam satu kabupaten. Selain bertujuan untuk membantu guru dalam mengembangkan kurikulum juga untuk mengantisipasi perbedaan suasana lingkungan dan kebutuhan daerah. Dilihat dari kematangan dan prinsip relevansi cara ini jelas merupakan suatu kebutuhan, sebab proses pematangan dan prinsip relevansi lebih mudah tercapai bila dibicarakan secara komprehensif.

Proses pengembangan SK dan KD kedalam indikator dan tujuan pembelajaran dilakukan oleh guru- dengan mempedomani materi pelajaran yang ada dalam buku-buku teks tanpa melakukan analisis terhadap SK dan KD. Seharusnya guru melakukan analisis kurikulum terlebih dahulu diantaranya menganalisis SK dan KD itu. Guru harus mencari konsep apa saja yang terkandung dalam generalisasi yang muncul dari Standar Kompetensi dan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum.

Tahap ketiga pengembangan tujuan pembelajaran kedalam materi pembelajaran yang dilakukan oleh guru yang bersangkutan merupakan langkah-langkah operasional yang sangat terkait dengan tingkat keprofesionalnya guru. Wawasan dan pengalaman guru sangat berperan dalam tahap ini. Perbedaan individual guru akan mempengaruhi substansi konstruksi materi pembelajaran. Namun di kota Padang tidak terlihat secara nyata perbedaan-perbedaan tersebut. Hal ini menunjukkan interaksi dan komunikasi guru sesamanya cukup berjalan dengan baik. Dalam pengertian lain menunjukkan bahwa kebersamaan dalam pelaksanaan pembelajaran PKn cukup baik di Kota Padang. Namun dalam kebersamaan tersebut terlihat juga aspek negatifnya yaitu materi pembelajaran yang telah dirumuskan dalam RPP ditiru atau dicopy saja oleh guru lain dari RPP temannya tersebut.

2. Materi Pembelajaran PKn

Materi pembelajaran PKn di SMA kota Padang pada dasarnya diawali dengan materi tentang bangsa dan negara yang kemudian dilanjutkan dengan kelengkapan negara seperti kelembagaan negara, ideologi bangsa dan negara, sistem politik dan sistem pemerintahan. Materi tersebut merupakan materi esensial yang harus diterima siswa sebelum masuk kedalam materi tentang demokrasi. Materi bagian awal ini mendasari materi tentang demokrasi. Semua warga negara dituntut untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupannya baik kehidupan berbangsa ataupun bernegara. Setelah itu materi PKn memuat prinsi-prinsip demokrasi dimana prinsip-prinsip tersebut tersebar ke dalam tahapan semester yang diikuti oleh siswa. Hampir setiap semester ada materi pembelajaran yang

terkait dengan demokrasi. Namun demikian materi pembelajaran itu dalam realisasi kelihatannya se akan- akan berdiri sendiri dan tidak terkait satu sama lain. Untuk terwujudnya perilaku demokrasi materi pembelajaran PKn yang terkait dengan demokrasi harus berdekatan. Bahkan yang lebih baik itu adalah terpadunya berbagai kegiatan menuju kehidupan yang demokratis dalam negara persatuan dan kesatuan bangsa. Bila dilihat dari soko gurunya demokrasi ternyata sebagian besar materi PKn SMA di Sumatera Barat telah tercakup oleh sokogurunya demokrasi. Soko guru demokrasi yang tidak terlihat secara nyata dalam materi PKn SMA diantaranya : kekuasaan mayoritas dan hak-hak minoritas, pluralisme sosial ekonomi dan politik.

Bila disimpulkan materi PKn. yang terkait langsung dengan prinsip demokrasi adalah: persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, jaminan hak asasi manusia, peradilan bebas yang tidak memihak, kebebasan mengemukakan pendapat secara lisan dan tertulis, kebebasan berorganisasi, dan pemilihan umum. Sedangkan materi lainnya lebih bersifat penunjang dari pelaksanaan prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara. Selain dari itu bila dilihat dari pemanfaatan materi tersebut lebih banyak dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Hanya sebagian kecil saja dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan kelompok kecil atau individu/pribadi. Materi yang terkait dengan prosedur bagaimana mengemukakan pendapat atau berorganisasi yang baik belum terlihat secara nyata dalam materi PKn. di SMA. Begitu juga materi tentang pengambilan keputusan dalam sistem demokrasi masih belum terlihat dengan nyata, seperti cara mengemukakan pendapat, cara mengambil keputusan, cara bermusyawarah. Musyawarah mufakat dengan suara

bulat merupakan prinsip atau nilai demokrasi yang berakar dalam kehidupan masyarakat bangsa Indonesia. Tetapi dalam realita pembelajaran PKn baru berupa penyampaian konsep dalam kelas belum lagi pada tataran aplikasi.

Materi yang memuat prinsip-prinsip demokrasi dalam materi pembelajaran PKn terlihat tersebar pada lima semester dan satu semester tidak memuatnya. Penyebaran semacam itu kurang bahkan tidak mendukung kearah pembentukan perilaku demokrasi tersebut, karena kesemua prinsip-prinsip demokrasi itu saling terkait dan dalam realisasinya tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh dapat dikemukakan kemerdekaan mengemukakan pendapat dapat direalisasikan dalam kehidupan masyarakat yang mempunyai kedudukan yang sama dan mempunyai wadah untuk itu. Wadah itu adalah media massa atau pada wadah organisasi siswa di sekolah. Pengambilan keputusan baik dengan musyawarah mufakat ataupun dengan suara terbanyak mesti dalam wadah tertentu yang dalam wadah itu semua anggota mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Selagi prinsip-prinsip itu diberikan pada tenggang waktu yang jauh akan sulit diharapkan terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi siswa dalam perilaku yang utuh.

Setelah melihat secara keseluruhan materi pembelajaran PKn di SMA ternyata sudah mengacu kepada komponen kurikulum yang ditetapkan secara nasional. Selain dari itu kelihatannya juga tidak terlalu banyak bedanya dengan materi umum Civic Education di negara-negara lain. Bila kita diskusikan dengan pendapat ahli lain ternyata materi pembelajaran PKn sudah mengarah kepada pembentukan warga negara demokratis sebagaimana dikatakan Sapriya dan Udin S. Winataputra (2006: 1.1) pada hakekatnya proses pembentukan karakter bangsa diharapkan mengarah

kepada penciptaan suatu masyarakat Indonesia yang menempatkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai titik sentral. Usaha ini merupakan tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi sebagaimana dikatakan Zamroni (1998: 5) "guna menjamin terwujudnya masyarakat demokratis, pendidikan demokrasi mutlak diperlukan. Pendidikan demokrasi bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat yang berfikir kritis dan bertindak demokratis".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian yang dideskripsikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Guru-guru PKn telah mengembangkan materi pembelajaran sesuai dengan tuntutan komponen kurikulum yang ditetapkan secara nasional. SK dan KD sudah dikembangkan kedalam indikator dan tujuan pembelajaran dan dilanjutkan dengan penembangan materi pembelajaran. Wadah untuk pengembangan materi tersebut adalah MGMP dan KKG. Kedua wadah tersebut terlihat cukup berfungsi dan sangat membantu guru dalam mengembangkan materi pembelajaran. Keaktifan MGMP terlihat dengan telah berhasilnya mengembangkan materi ajar kedalam bentuk buku ajar. Modul PKn. Kerjasama guru dalam pembelajaran PKn cukup baik terutama dalam mempersiapkan bahan pembelajaran. Namun demikian dalam mengembangkan SK dan KD terlihat belum dilakukan analisis SK dan KD itu secara lebih mendalam.
2. Materi Pembelajaran PKn SMA Kota Padang sudah mengacu kepada kurikulum tingkat nasional dan materi yang dikembangkan itu menempatkan demokrasi sebagai titik sentral. Dari enam semester pembelajaran PKn di SMA hanya satu semester yang tidak memuat prinsip-prinsip demokrasi. Namun demikian materi itu juga memberikan dasar untuk terlaksananya prinsip-prinsip demokrasi. Bila dibandingkan dengan materi pembelajaran Civic education atau PKn di negara lain terutama dinegara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Australia ternyata prinsip-prinsip umumnya tidak jauh berbeda.

B. Saran

Berdasarkan temuan penelitian dapat disampaikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan dalam mengembangkan materi pembelajaran guru-guru PKn diharapkan menganalisis lebih jauh SK dan KD yang sudah ditetapkan secara nasional. Selain dari itu juga menjalin kerjasama yang baik dengan berbagai komponen pendidikan (Stakeholder) dalam melakukan pengembangan kurikulum, termasuk dengan Perguruan Tinggi.
2. Proses pengembangan materi pembelajaran hendaknya juga memperhatikan proses berfikir induktif karena yang diharapkan dalam pembelajaran PKn juga berkembangnya kreativitas dan aktivitas siswa dalam kehidupannya. Selain dari juga mampu memahami dan menyikap segala persoalan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR RUJUKAN

- A, Muri Yusuf, 2007, *Metodologi Penelitian*, UNP Pres, Padang.
- Andrain, Charles F, 1992 , *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial* (terjemahan), Tiara Wacana Yokya, Yokyakarta.
- Andrinof A.Ch & Edy Utama , 1996 , " *Politik Masa Mengambang dan Demokrasi* " , *Genta Budaya* , Padang
- Baise, Marilynne Boyle (2001), *Democratic Teacher Education through Multicultural Service Learning*, ERIC USA.
- Bambang Daroeso, 1986, *Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila*, Aneka Ilmu, Semarang.
- Benda, Keebet Von- Beckmann, 2000, *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, Grasindo, Jakarta.
- Berkman, H.W. dan Gilson, C, 1981, *Consumer Behavior: Concepts and Strategies*
- Bogdan Robert & Taylor, Steven J., 1992 . *Pengantar Metoda Penelitian Kualitatif*(alih bahasa), Usaha Nasional , Surabaya Indonesia.
- Branson, Margaret Stimmann (2001), *Content at the Core of Education for Citizenship in a Democracy*, ERIC USA.
- Budiardjo, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Butts, R. Freeman (2001), *Why Should Civic Learning Be at the Core of Social Studies Teacher Education in the United States?*, ERIC, 2001.
- Cartier, J.L.,J.Stewart & B.Zoellner, 2006, *Modelling and Inquiry in a High School Genetic Class*, *Journal The American Biology Theacher*: 68 (6), 334-340.
- Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ch. N. Latief Dt. Bandaro, dkk, 2004, *Minangkabau yang Gelisah*, Lubuk Agung, Bandung.
- Delors, Jacques. Dkk ,1999, *Belajar: Harta Karun di Dalamnya* (Laporan kepada UNESCO dari Komisi Internasional tentang Pendidikan untuk abad XXI) (terjemahan), UNESCO/ Komisi Nasional Indonesia untuk ENESCO Depdiknas, Jakarta.

DePorter, Bobbi & Mike Hernacki, 2008, *Quantum Learning* (terjemahan), PT. Mizan Pustaka, Bandung.

Djahiri, A.Kosasih, 1978, *Pengajaran Studi Sosial/ IPS Dasar-dasar pengertian- Metodologi Model Belajar- Mengajar Ilmu Pengetahuan Sosial*, LPPP-IPS FKIS IKIP Bandung.

Domjan, Michael, 2003, *The Principles of Learning and Behavior*, Thomson, Australia, Canada, Mexico, Singapore, Spain, United Kingdom, United States.

Glaser, Barney G dan Anslem L. Straus, 1974, *The Discovery of Grounded Theory*, Aldine Publishing Company, Chicago.

Haas Nancy (2001), *Using We the People.... Programs in Social Studies Teacher Education*, ERIC, USA.

H.A.R. Tilaar, 1999, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional dalam Perspektif Abad 21*, Indonesia Tera, Magelang.

-----, 2003, *Kekuasaan & Pendidikan Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural*, Indonesiatera, Magelang.

Helmi Hasan, 2004, *Demokrasi Adat Minangkabau sebagai Modal Sosial Lokal dan Kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaannya suatu Studi di Kenagarian Situjuh Gadang Kabupaten Lima Puluh Kota, (Tesis) Pasca Sarjana UNP Padang*

Hermana Somantrie, 2006, *Pengembangan Tingkat Demokratik (Democratic Quotient) dan Nilai-nilai Demokrasi melalui Pendidikan Kewarganegaraan*, Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Hermana Somantrie, 2006, *Budaya Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pengembangan Budaya Demokrasi di Sekolah*, Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Hermana Somantrie, 2006, *Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Era Reformasi (Suatu Analisis Pengembangan dari Tahun 1999 sampai dengan Tahun 2006)*, Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Hess, Diana (2001), *Teaching to Public Controversy in a Democracy*, ERIC, USA.

Hilman Hadikusuma, 1981, *Hukum Ketatanegaraan Adat*, Alumni, Bandung.

- , 2002, "Tantangan Demokratisasi dan Partisipasi Masyarakat di Tingkat Nagari", *Buletin Flamma*, Yogyakarta.
- , 1989, Nagari Versus Desa: Sebuah Kerancuan Struktural, dalam *Nagari, Desa dan Pembangunan Pedesaan di Sumatera Barat (Kumpulan Makalah)*, Yayasan Genta Budaya, Padang.
- Nasroen, M, (1971) *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Bulan Bintang, Jakarta
- Nelson Lynn,R and Frederick D. Drake (2001), *Civic Intelligence and Liberal Intelligence in the History Education of Social Studies Teachers and Students*, ERIC, USA.
- Nico Daryanto, 1994, *Pengaruh Patrimonialisme Terhadap Kelas Menengah dan Budaya Politik Sipil di Indonesia*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.
- Nurhadi,B.Yasin,A.G. Senduk, 2004, *Pembelajaran Kontekstual*, Malang, Penerbit Universitas Negeri, Malang.
- Orlich,C.D.,R.J. Harder, R.C.Callahan, & H.W.Gibson, 1998, *Teaching Strategies A Guede to Better Instruction*.5th edition, New York: Hushon Miffin Co.
- Parker, Walter C (2001), *Teaching Teachers to Lead Discussions: Democratic Education in Content and Method*, ERIC, USA
- Patrick, John J. and Robert S.Leming (Editor),(2001), *Principles and Practices of Democracy in The Education of Social Studies Teachers*, Educational Resources Information Center (ERIC)
- Patrick, John J. and Thomas S.Vontz, (2001), *Components of Education for Democratic Citizenship in the Preparation of Social Studies Teachers*, ERIC, USA.
- Paul Suparno, 1997, *Filsafat Konstruktivisme Pendidikan*, Kanius, Jogyakarta
- Poloma, Margaret M., 1992, *Sosiologi Kontemporer*, Rajawali, Jakarta.
- Prayitno, 2002, *Hubungan Pendidikan*, Depdiknas Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat SLTP, Jakarta.
- Pratt, S. 2003, Cooperative Learning Strategies. *The Science Teaher*. 70(4), 25-29.
- Print, Murray (2001), *Education for Citizenship in a Democracy through Teacher Education: Examples from Australia*, ERIC USA.
- Ramlan Surbakti (1992), *Memahami Ilmu Politik*, Grasino Jakarta

- Ravich, DIANE, 1991, *What is Democracy and How It Should be Taught in the Schools*, Federasi Guru Amerika, Education for Democracy/ International-United States Information Agency.
- Ritzer, George, 2002, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Raja Grafindo Persada, Jakarta .
- Robi Nurhadi, 2007, Demokratisasi Proseduralis Dalam Pilkada DKI Jakarta, *Jurnal Poelitik*, Program Magister Ilmu Politik Universitas Nasional.
- Rodee, Carlton Clymer dkk, 1983 , *Pengantar Ilmu Politik (terjemahan)* , Rajawali , Jakarta.
- Sanafiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang.
- Santrock, John W, 2007, *Psikologi Pendidikan (terjemahan Tri Wibowo BS.)*, Kencana, Jakarta.
- Sapriya dan Udin S. Winataputra, 2006, *Paradigma Baru PKn di SD*, Universitar Terbuka, Jakarta.
- Slavin, R.E. 1995, *Cooperative Learning*. 2 th edition, Singapore: Allyn Bacon
- Straits, W.J. & R.R. Wilke, 2002, Practical Considerations for Assessing Inquiry-Basewd Instruction, *Journal of College and Science Teaching*. 31 (7), 432-435)
- Sutton, Margaret, Isnarmi Moeis, and Wendy Caylord, 2003, *Civic Learning in Teacher Aducation through an American - Indonesian Partnership*, Eric USA.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta
- Tinzmann, M.B., B.F. Jones, T.F. Fennimore, J.Baker, C.Fine, & J.Pieree,1990, What is the Colaborative Classroom? (Online),(<http://www.ncrel.org/sdrs/rpl.esys.collab.htm>, diakses: 23 Juli 2005)
- Udin S. Winataputra, dkk. 2006, *Materi dan Pembelajaran PKN SD*, Universitas Terbuka, Jakarta.
- Wina Sanjaya, 2007, *Strategi Pembelajaran berorientasi Standar Prosés Pendidikan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Zaim Elmubarok, 2008, *Membumikan Pendidikan Nilai*, Alfabeta, Bandung
- Zamroni, 2001, *Pendidikan Untuk Demokrasi Tantangan Menuju Civil Society*, Bigraf Publishing, Yogyakarta.